

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kecenderungan kecurangan khususnya dalam dunia akuntansi sampai saat ini sudah menjadi perhatian publik, kecurangan akuntansi telah terjadi yang menimbulkan berbagai dampak seperti kerugian yang sangat besar hampir di semua sektor terkhususnya pada sektor ekonomi. Kasus kecurangan di Indonesia telah terjadi secara berulang dari tahun ke tahun. Disatu sisi media masa sudah banyak yang memberitakan mengenai kasus tersebut sehingga bagi masyarakat kasus kecurangan bukan rahasia umum lagi. Pada sektor publik kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), manipulasi pajak, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan pada sektor swasta kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank seperti pada Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bapindo, Bank Exim di merger menjadi Bank Mandiri. Bank Pikko, Bank Denpac, Bank CIC di merger menjadi Bank Century. Bank Niaga, Bank Lippo di merger menjadi Bank CIMB Niaga (Zilmy, 2013).

Kecurangan pada dasarnya ialah upaya yang disengaja untuk memanfaatkan hak orang lain untuk kepentingan individu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat, Arens (2004) yang mengemukakan kecurangan ialah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang lain. Jika dikaitkan dengan konteks laporan keuangan, kecurangan ialah suatu salah saji

laporan keuangan yang disengaja. Terdapat opini yang menjelaskan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai suatu tendensi korupsi dalam definisi dan terminology karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta yang menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan dan omisi fakta kritis (Soepardi, 2007). Indikasi adanya kecurangan akuntansi dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2013) mengungkapkan bahwa kecurangan akuntansi sebagai salah saji dan akan menimbulkan kecurangan terhadap laporan keuangan yaitu berupa salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas, yang dominan laporan keuangan tidak disajikan dengan benar menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut Donald R. Cressey (dalam Pratama Ade, 2020) menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi dapat disebabkan oleh tiga faktor yang dinamakan dengan konsep segitiga kecurangan atau *fraud triangle theory*. Tiga faktor tersebut merupakan faktor yang bisa disebut menyebabkan terjadinya kecurangan, yang dimana kecurangan terjadi akibat adanya kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*) dan rasionalisasi (*rationalization*) menurut (Tuanakotta, 2010). Salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan suatu tindakan pembenaran yang dilakukan para pelaku kecurangan yang biasanya berkaitan dengan komitmen organisasi.

Menurut Robbins dan Judge (2008) menjelaskan bahwa komitmen merupakan suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi dan tujuan-tujuan serta keinginannya mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Konsep komitmen diawali dengan konsep komitmen organisasional yang didasari pada premis bahwa seseorang membentuk suatu keterikatan terhadap suatu organisasi. Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan karyawan atas nilai-nilai organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi, maka dari sana akan menimbulkan rasa ikut serta memiliki bagi karyawan terhadap organisasi.

Komitmen organisasi menurut Allen, N.J., dan Meyer (1991) mengemukakan komitmen sebagai suatu konstruk psikologi yang merupakan ciri hubungan anggota dengan organisasinya. Komitmen organisasi ialah suatu kesetiaan atau loyalitas seseorang terhadap instansi tempat mereka bekerja. Suatu komitmen dalam organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap serta perasaan karyawan dan dihubungkan dengan nilai-nilai serta cara organisasi tersebut melakukan suatu hal termasuk juga sikap karyawan dalam melakukan suatu tindakan kecurangan. Semakin tinggi komitmen karyawan terhadap organisasi, maka karyawan tersebut akan cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang bisa saja menghambat tercapainya tujuan organisasi, sebaliknya jika karyawan mempunyai komitmen yang rendah terhadap organisasinya, maka karyawan akan cenderung melakukan hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan organisasi demi tujuan pribadinya (Najahningrum, 2013). Menurut Ikhsan dan Iskak (2005) menyatakan dua komponen tentang komitmen organisasi yaitu komitmen afektif (*affective commitment*) dan komitmen normatif (*normative commitment*).

Pendapat diatas didukung dengan penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan oleh Astria et al (2021) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut didukung oleh penelitian Jeflani Saragih (2017) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Natalia & Coryanata (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain rasionalisasi, kecurangan dapat terjadi karena adanya faktor kesempatan, dimana dalam keadaan ini seseorang dapat melakukan suatu tindakan kecurangan karena terdapatnya suatu kesempatan, faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecurangan yaitu asimetri informasi.

Asimetri informasi ialah suatu keadaan dimana *agent* mempunyai akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak *principal*. Asimetri informasi terjadi ketika *agent* lebih mengenal informasi internal dan prospek di masa yang akan datang dibandingkan dengan *principal* dan *stakeholder* lainnya. Anthony dan Govindarajan (2001) menjelaskan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (*agency theory*) yaitu *principal* (pemilik/atasan) memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya. Novitasari & Kusumastuti (2019) mengemukakan terdapat dua jenis asimetri informasi yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. Menurut Najahninggrum (2013) mengemukakan bahwa apabila terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dengan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Disamping itu juga pihak

pengguna akan cenderung dapat melakukan tindakan kecurangan jika informasi yang diterima dari pihak pengelola tidak sesuai dengan keadaan perusahaan. *Agent* (bawahan) mempunyai informasi yang lebih banyak tentang kapabilitas produksi mereka dibandingkan dengan *principal* (atasan). Ditinjau dari perspektif keagenan, asimetri informasi memotivasi bawahan untuk memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tentang kapabilitas produksi mereka. Menurut Sciff dan Lewin (dalam Sari, 2004) mengatakan apabila atasan mengizinkan bawahan untuk berpartisipasi dalam pendapatan anggaran dapat digunakan sebagai alat menjaring informasi privat yang dimiliki bawahan.

Pendapat di atas didukung dengan penelitian mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan oleh Muna & Harris (2018) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut didukung oleh penelitian Diana Dewi (2018) asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan menurut penelitian Ainy (2022) ditemukan hasil yang berbeda yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Faktor terakhir yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecurangan yaitu tekanan. Tekanan dari dalam diri individu dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, salah satu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja yaitu keadilan organisasional. Keadilan yang dimaksudkan yaitu berkaitan dengan *reward* yaitu berupa gaji atau kompensasi atas tanggungjawab yang telah diselesaikannya.

Hasibuan (2005) menjelaskan kompensasi merupakan suatu pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung, yang diterima oleh

karyawan sebagai suatu imbalan atas jasa yang telah diberikannya kepada perusahaan. Kesesuaian kompensasi merupakan suatu kecocokan dan kepuasan karyawan atas apa yang telah diberikan perusahaan kepada mereka baik berupa upah perjam maupun gaji secara periodik sebagai balasan dari pekerjaan yang telah diselesaikan oleh individu tersebut. Sehingga dapat disimpulkan kesesuaian kompensasi merupakan kesesuaian pendapatan yang diterima karyawan sebagai suatu balas jasa atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh individu tersebut. Salah satu akibat yang fatal jika terjadinya ketidaksesuaian kompensasi yaitu kecurangan akuntansi. Manajemen maupun karyawan melakukan perilaku menyimpang dari tujuan perusahaan yang ditutupi dengan penyajian yang tidak konsisten dalam laporan keuangan, seperti misalnya pencurian kas perusahaan, manipulasi catatan, kebutuhan untuk berhasil dan mempertahankan diri, menyebabkan manajer melakukan penipuan dalam laporan keuangan.

Pendapat diatas didukung dengan penelitian mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi oleh Ryan & Ibrahim (2017) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut didukung oleh penelitian Aulia & Helmayunita (2019) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan menurut penelitian P Damayanti & Purwantini (2021) ditemukan hasil yang berbeda yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Lembaga keuangan mempunyai peran aktif dalam suatu negara guna membantu pertumbuhan ekonomi. Adanya lembaga keuangan membantu

masyarakat dalam merespon setiap kebijakan ekonomi yang diterbitkan oleh pemerintah. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terkenal akan budaya dan adat istiadat yang dimilikinya. Bali merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh banyak masyarakat yang terangkum dalam suatu desa adat atau yang biasa disebut dengan desa pekraman. Dalam mendukung pembangunan desa, pemerintah memberikan kedudukan kepada kepala desa adat dalam membentuk suatu lembaga keuangan non bank yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD adalah suatu lembaga keuangan non bank yang di bentuk, di kelola, dan di miliki oleh desa pekraman, serta hanya melayani kebutuhan masyarakat anggota desa pekraman yang mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suarniti & Sari, 2020).

Melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984 dibentuklah suatu lembaga keuangan yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mempunyai tujuan untuk membantu pengelolaan kekayaan desa adat termasuk dengan kekayaan yang dimiliki masyarakat desa guna dalam peningkatan perekonomian. Disisi lain LPD bertujuan untuk membantu masyarakat desa dalam hal pengelolaan modal untuk dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi rakyat, untuk mencapai hal tersebut LPD menghimpun dana dari masyarakat desa yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kabupaten Gianyar, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali berjumlah 297 LPD yang tersebar di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Adapaun daftar jumlah seluruh LPD yang ada di Kabupaten Gianyar, dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 Daftar Seluruh LPD Kabupaten Gianyar**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belahbatuh	36 Unit
2	Gianyar	40 Unit
3	Payangan	48 Unit
4	Sukawati	33 Unit
5	Tegallalang	45 Unit
6	Ubud	32 Unit
7	Tampaksiring	36 Unit
<b>TOTAL</b>		<b>297 Unit</b>

(Sumber: Laporan Gabungan LPLPD Kab. Gianyar, 2022)

Sejalan dengan perkembangannya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada mengalami berbagai permasalahan yang terjadi. Kabupaten Gianyar mempunyai 297 LPD, yang dimana dari 297 LPD tersebut terdapat beberapa LPD yang tidak berjalan atau berkembang dengan baik, karena masih terdapat 24 LPD di Kabupaten Gianyar masih mengalami permasalahan. Kecamatan Tampaksiring merupakan satu diantara 7 kecamatan di Kabupaten Gianyar yang mempunyai 36 LPD, tersebar di masing-masing desa adat di Kecamatan Tampaksiring, di antaranya 34 LPD yang masuk kedalam kategori aktif dan 2 LPD yang sudah non aktif. Khususnya di Kecamatan Tampaksiring terdapat dua LPD yang mengalami permasalahan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Belusung dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Kulub. Permasalahan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kabupaten Gianyar salah satunya pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Kulub sebagian besar disebabkan oleh kredit yang macet akibat terdampak pandemi *Covid-19*, pengalagunaan dana nasabah (kredit fiktif) dan ketidakharmonisan karyawan LPD ([www.balipost.com/2022](http://www.balipost.com/2022)).

Fenomena kecurangan yang terjadi dilapangan dapat dilihat dari salah satu kasus LPD di Kecamatan Tampaksiring yaitu pada LPD Desa Pekraman Belusung



yaitu permasalahan yang terjadi adalah tindakan kecurangan berupa pidana korupsi. Korupsi ini dilakukan oleh beberapa karyawan LPD Belusung. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan LPD Desa Adat Belusung yang diaudit oleh inspektorat Kabupaten Gianyar, dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.2.636.956,000 nilai ini disebut sebagai kerugian keuangan negara LPD Desa Adat Belusung, karyawan LPD yang terlibat dalam kasus ini dinilai bersalah dan diduga menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Karyawan LPD yang terlibat dalam kasus ini selaku penerima hasil rekapitulasi harian setoran maupun penarikan tabungan dari petugas tabungan atau kolektor untuk diadministrasikan atau di input ke sistem LPD. Selain itu, petugas bagian dana ini juga tidak pernah mencatat dan menginput setoran nasabah yang datang ke LPD (<https://www.balipost.com/2022>).

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- 1) Adanya kasus kecurangan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Gianyar. Salah satunya terjadi di Kecamatan Tampaksiring yaitu pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Belusung dan Desa Pekraman Kulub.

- 2) Kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal LPD yaitu melakukan tindakan penggelapan dana dari nasabah. Dalam kasus ini yang terjadi pihak internal LPD melakukan penggelapan dana dari nasabah untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Permasalahan yang terjadi berupa kredit macet akibat pandemi sebelumnya, kredit fiktif dan ketidakharmonisan antara atasan dengan bawahan.
- 4) Terdapat kesenjangan hasil penelitian terkait dengan pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
- 5) Terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi seperti kesesuaian kompensasi, asimetri informasi dan komitmen organisasi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sehingga lebih fokus dalam permasalahan mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD), begitu juga dengan data yang hanya mencakup dengan penelitian ini saja.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring?
- 2) Bagaimanakah pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring?
- 3) Bagaimanakah pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring?
- 4) Bagaimanakah pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring.

- 4) Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Tampaksiring.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini, yaitu diantaranya sebagai berikut.

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya MSDM berkaitan dengan kesesuaian kompensasi, asimetri informasi dan komitmen organisasi.

### 1.6.2. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada (LPD) Kecamatan Tampaksiring.

#### 2) Bagi Pihak LPD

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak LPD untuk mengetahui pentingnya kesesuaian kompensasi, asimetri informasi dan komitmen organisasi serta bisa sebagai masukan untuk pimpinan, karyawan dan nasabah suatu organisasi/perusahaan.

#### 3) Bagi Pihak Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi dan komitmen

organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi dan mengatahui tentang (MSDM). Selain itu peneliti juga bisa mengetahui tugas akhir syarat untuk kelulusan di perkuliahan.

4) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti kedepannya, sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris mengenai kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

